

Catatan Teknis: COVID-19 dan Anak-Anak yang Dicabut Kebebasannya

Pendahuluan

Pengalaman dari wabah-wabah penyakit menular terdahulu mengindikasikan bahwa risiko-risiko baru terkait perlindungan anak mungkin muncul sebagai dampak langsung dari COVID-19, termasuk dari langkah-langkah yang diterapkan untuk mencegah dan mengendalikan penyebarannya. Selain itu, risiko-risiko terkait perlindungan anak yang sebelumnya sudah ada kemungkinan akan semakin parah. Kelompok masyarakat tertentu akan menjadi kian rentan dalam situasi ini, termasuk, sebagaimana dibahas dalam Catatan ini, anak-anak yang dicabut kebebasannya, yang seringkali memiliki masalah psikososial, fisik, dan kesehatan, yang tinggal di lingkungan padat dan tidak higienis, serta yang lebih rentan terhadap pelecehan dan pengabaian.

Pelajaran berharga dari penyebaran wabah-wabah terdahulu menekankan bahwa Negara perlu mengakomodasi kebutuhan perlindungan anak yang meningkat dalam rancangan dan penerapan rencana penanggulangan wabah. Kegagalan memenuhi kebutuhan tersebut, atau keterlambatan penerapan respons yang terkoordinasi, bisa memperparah penderitaan anak sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak bisa diperbaiki, dan bisa menunda pemulihan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam merespons pandemi COVID-19, Negara perlu memastikan bahwa hak-hak asasi setiap anak yang dicabut kebebasannya benar-benar dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Hal ini meliputi penyediaan perawatan yang memadai dan perlindungan dari bahaya, termasuk dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi kepadatan atau *overcrowding* di fasilitas-fasilitas penahanan anak dan memastikan agar setiap anak ditempatkan di lingkungan yang aman, baik di tempat tinggal non-tahanan, keluarga, atau komunitas. Ini juga berarti semua keputusan dan tindakan yang menyangkut anak harus didasari prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak, juga hak-hak anak untuk hidup, bertahan, dan berkembang, serta untuk didengar.

Catatan ini bertujuan memberikan informasi dan langkah-langkah penting bagi pihak yang berwenang dalam penahanan dalam merespons COVID-19, termasuk dalam:

1. Memberlakukan moratorium bagi anak-anak baru yang memasuki fasilitas penahanan;
2. Membebaskan semua anak-anak yang bisa dibebaskan dengan aman; dan
3. Melindungi kesehatan dan kualitas hidup anak-anak yang harus tetap tinggal dalam tahanan.

1. Memahami Cara Melindungi Hak-Hak Anak yang Dicabut Kebebasannya dan

Menghindari Penambahan Jumlah Anak dalam Tahanan Selama Pandemi COVID-19

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (CRC) berlaku untuk semua anak dan di segala konteks, termasuk dalam situasi darurat. Setiap harinya di seluruh dunia, [ratusan ribu anak](#) dicabut kebebasannya dalam fasilitas penahanan. Meski siapa saja bisa tertular penyakit yang disebabkan virus corona (COVID-19), anak-anak yang dicabut kebebasannya di fasilitas penahanan, termasuk mereka yang ditahan bersama orang tua atau pengasuh, mereka yang mendekam dalam tahanan imigrasiⁱⁱⁱ dan mereka yang ditahan atas alasan keamanan nasionalⁱⁱⁱ, menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk tertular dan menularkan penyakit ini.^{iv} Langkah-langkah yang diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus beserta dampak sosial dari langkah-langkah tersebut juga cenderung berdampak negatif terhadap kualitas hidup dan perkembangan sehat anak, termasuk perawatan yang memadai dalam tahanan, serta dukungan keluarga dan masyarakat.

Menurut Pasal 24 CRC, anak berhak atas standar kesehatan tertinggi yang mungkin dicapai. Anak-anak yang dicabut kebebasannya lebih rentan terinfeksi COVID-19 karena keterbatasan kondisi tempat tinggal mereka. Perampasan kebebasan mempersulit penerapan isolasi diri atau pembatasan fisik, khususnya di fasilitas-fasilitas penahanan yang terlampau padat dan tidak bersih, di mana akses air, sanitasi, dan kebersihan dasar dibatasi karena alasan keamanan atau infrastruktur. Anak-anak yang dicabut kebebasannya memiliki karakteristik demografis yang serupa, dengan kondisi kesehatan yang lebih buruk dari penduduk lain pada umumnya, cenderung memiliki atau mengalami masalah-masalah psikososial, kesehatan fisik, dan mental yang diperparah fakta bahwa mereka ditempatkan dalam tahanan tanpa layanan kesehatan yang bermutu bahkan sebelum keadaan menjadi darurat. Dalam kondisi seperti ini, fasilitas penahanan justru mungkin menjadi sumber penularan, amplifikasi, dan penyebaran COVID-19 di dalam maupun di luar fasilitas penahanan.

Fasilitas penahanan tidak hanya mengakibatkan anak-anak berisiko tinggi tertular virus, tetapi juga staf yang bekerja di fasilitas penahanan (petugas kepolisian, petugas tahanan, pengasuh, pekerja sosial, petugas kesehatan, dll.), keluarga mereka, dan warga sekitar. Staf mungkin tidak dibekali dengan perlengkapan pelindung diri. Staf juga mungkin mengalami ketakutan dan menghadapi stigma, khususnya apabila penyebaran wabah terjadi dari dalam fasilitas tahanan. Di berbagai negara, COVID-19 [mulai merebak di penjara-penjara](#), rumah tahanan, dan penahanan imigrasi, serta tempat-tempat lain di mana anak dicabut kebebasannya.^v Menanggapi fenomena ini, banyak negara kini mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi jumlah anak-anak yang dicabut kebebasannya.^{vi}

Selain itu, langkah-langkah pencegahan dan pengendalian kesehatan masyarakat di dalam

fasilitas penahanan dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai risiko kekerasan yang sebelumnya sudah tinggi, termasuk kekerasan berbasis gender. Dalam banyak kasus, fasilitas penahanan berlokasi jauh dari keluarga, rumah, dan lingkungan asal anak dan komunikasi rutin seringkali terbatas. Hal ini berkontribusi pada ketakutan dan ketidakpastian yang lebih besar, yang semakin mempengaruhi kesehatan dan kesentosaan (termasuk [kesentosaan mental dan psikososal](#)) anak-anak dan keluarga mereka. Anak-anak juga mungkin menghadapi stigma jika wabah merebak di dalam fasilitas penahanan, yang berpotensi membuat mereka semakin tertinggal. Di samping itu, staf yang jatuh sakit menyebabkan berkurangnya jumlah staf sehingga tidak memadai untuk merawat dan melindungi anak-anak yang dicabut kebebasannya. Minimnya pengawasan dan perawatan berpotensi meningkatkan kerentanan anak, termasuk kerentanan terhadap kekerasan, pelecehan, dan pengabaian, serta meningkatkan kemungkinan bahwa mereka akan dikurung di dalam ruangan yang lebih sempit agar lebih mudah dikendalikan atau diawasi.^{vii}

Di beberapa negara, langkah-langkah untuk menghentikan penyebaran COVID-19 justru meningkatkan jumlah anak-anak yang dicabut kebebasannya. Selain itu, pelepasan tahanan tetap dibatasi meskipun ada amnesti atau perintah pelepasan tahanan secara umum yang bertujuan mengurangi kepadatan fasilitas penahanan. Langkah-langkah yang dimaksud termasuk penutupan pengadilan, penundaan sidang pidana atau sidang administratif, pembatasan kebebasan bergerak, pembatasan akses ke kuasa hukum atau keluarga bagi anak-anak yang dicabut kebebasannya, penutupan perbatasan, atau perluasan penerapan penahanan pra-pemindahan alih-alih penghentian deportasi dan pembebasan anak-anak ke dalam pengasuhan alternatif non-penahanan.

2. Rekomendasi terkait tindakan pencabutan kebebasan dan langkah-langkah darurat selama wabah COVID-19

2.1 Pertimbangan Utama dalam Penerapan Langkah-Langkah Tanggap Darurat

Respons negara untuk memerangi pandemi COVID-19 bagi anak-anak yang dicabut kebebasannya, [termasuk langkah-langkah darurat demi kesehatan masyarakat](#), harus benar-benar mematuhi hukum dan standar internasional tentang hak asasi manusia. Setiap respons yang diambil harus proporsional, benar-benar diperlukan, terikat waktu, dapat ditinjau, tidak diskriminatif terhadap risiko yang dievaluasi, dan didasari kepentingan terbaik anak-anak.

- Negara tidak boleh menggunakan langkah-langkah darurat untuk membatasi atau [mengekan hak anak](#) secara tidak sah, termasuk mencabut kebebasan mereka. Negara harus senantiasa mengakui bahwa ada hak-hak tertentu yang tidak dapat dihilangkan^{viii};
- Negara harus menerapkan kehati-hatian dalam menyikapi kerentanan unik yang dimiliki [anak laki-laki](#) dan [anak perempuan](#), anak-anak yang didiskriminasi karena [orientasi](#)

[seksual atau identitas gender](#) mereka, [anak-anak dengan disabilitas](#), anak-anak migran/ pencari suaka/ pengungsi/ tanpa status kewarganegaraan, anak-anak dari komunitas adat, anak-anak dari komunitas etnis minoritas, anak-anak yang hidup di jalanan, anak-anak yang berafiliasi dengan kelompok bersenjata dan angkatan bersenjata serta kelompok rentan atau termarginalkan lainnya;

- Negara perlu memastikan bahwa langkah-langkah darurat yang diambil untuk mencegah, menanggulangi, atau merespons penyebaran virus tidak berakibat perpanjangan masa penahanan anak-anak yang seharusnya sudah dibebaskan atau menyebabkan semakin banyak anak yang dicabut kebebasannya.
-

2.2 Mematuhi Hukum dan Standar Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Menegakkan Keadilan untuk Anak

Negara tetap memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi hukum dan standar internasional tentang hak asasi manusia^{ix} dalam menegakkan keadilan untuk anak, termasuk:

- Sebagai aturan umum, penangkapan, penahanan dan pemenjaraan hanya digunakan sebagai jalan terakhir dan dalam masa waktu sesingkat mungkin;
- Dengan segera dan sepenuhnya mengakhiri pencabutan kebebasan anak atas dasar status migrasi orang tua, karena hal tersebut tidak pernah didasari kepentingan terbaik anak, dan melarang penahanan imigrasi anak-anak dalam hukum, kebijakan, dan praktik;
- Memperlakukan setiap anak yang dicabut kebebasannya dengan rasa kemanusiaan dan menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia serta secara ketat memastikan pemenuhan hak anak atas proses peradilan yang adil dan hak-hak prosedural. Pihak berwenang, termasuk jaksa dan hakim, harus melaksanakan kewenangan penahanan mereka dengan hati-hati mengingat sifat ekstrem dari tindakan penahanan itu sendiri, meningkatnya kerentanan anak, dan senantiasa menjadikan kepentingan terbaik bagi anak pertimbangan utama, khususnya dalam konteks COVID-19 saat ini. Langkah-langkah alternatif harus selalu diprioritaskan dan dipromosikan dengan menerapkan semua perlindungan yang diperlukan bagi anak-anak dan keluarga mereka pada masa ini;
- Menerapkan langkah-langkah yang diperlukan agar setiap anak bisa tetap mempertahankan komunikasi rutin dengan keluarga melalui korespondensi dan kunjungan-kunjungan;
- Menyediakan akses yang cepat bagi setiap anak yang dicabut kebebasannya untuk memperoleh bantuan hukum khusus dan bantuan lainnya yang diperlukan, serta menyediakan metode dan sarana untuk menentang legalitas pencabutan kebebasan di hadapan pengadilan atau pihak berwenang lain yang kompeten, independen dan

imparsial, dan dengan keputusan yang cepat atas setiap tindakan tersebut;

- Bilamana anak tidak dapat dibebaskan atau langkah alternatif tidak memungkinkan, mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan dan memelihara kondisi fasilitas tempat anak-anak dicabut kebebasannya agar fasilitas tersebut senantiasa memenuhi standar internasional minimum yang relevan, termasuk yang menyangkut rasio anak per staf, dan menyediakan layanan yang diperlukan bagi anak.

2.3 Perlindungan dari Diskriminasi

Negara perlu menerapkan langkah-langkah perlindungan terhadap diskriminasi:

- Negara perlu menyediakan akses bagi anak-anak yang dicabut kebebasannya untuk memperoleh layanan kesehatan dan layanan lain dengan taraf yang setara dengan layanan-layanan yang tersedia untuk anak-anak lain dalam masyarakat, tanpa diskriminasi;
- Negara perlu menerapkan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan pendekatan responsif gender dalam menangani keadaan darurat COVID-19 di berbagai tempat anak-anak dicabut kebebasannya, termasuk menyediakan kebutuhan khusus untuk bayi dan anak-anak yang dicabut kebebasannya bersama ibu mereka, khususnya fasilitas untuk ibu menyusui;
- Negara perlu menyediakan anak-anak yang dicabut kebebasannya informasi yang sama tentang pandemi dengan yang diberikan kepada anak-anak lain dalam masyarakat, beserta informasi tentang bagaimana mereka bisa melindungi diri, dengan memastikan informasi tersebut mudah diakses dan ramah anak;^{xi}
- Negara seyogianya tidak menahan anak-anak yang tinggal di jalanan, dan mengakui bahwa situasi unik yang mereka alami mungkin membuat mereka tidak bisa memenuhi beberapa langkah yang ditetapkan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Dalam kasus-kasus seperti itu, anak-anak selayaknya dihubungkan dengan pihak berwenang terkait perlindungan anak atau layanan nonpemerintah.

3. Rekomendasi untuk memastikan pembebasan segera, penggunaan langkah-langkah alternatif, dan tidak ada penambahan jumlah anak yang ditahan selama pandemi COVID-19

Sesuai dengan kewajiban hukum hak asasi manusia internasional yang mengikat tentang [keadilan anak](#) dan anak yang dicabut kebebasannya, dan sejalan dengan [Pedoman Sementara](#)

[WHO tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam penjara dan tempat-tempat penahanan](#) (Pedoman WHO tentang COVID-19 dalam Fasilitas Penahanan), [Pedoman Sementara IASC tentang COVID-19: Fokus pada Orang-Orang yang Dicabut Kebebasannya](#) (Pedoman Sementara IASC), [Standar-Standar Minimum untuk Perlindungan Anak dalam Tindakan Kemanusiaan](#)^{xii}, Negara perlu *memprioritaskan pengalihan anak-anak dari proses-proses peradilan formal, dan penggunaan tindakan alternatif untuk penahanan* di setiap tahapan proses hukum pidana atau tahapan administratif. Demi mencapai tujuan tersebut:

3.1 Memprioritaskan Anak-Anak untuk Segera Dibebaskan

Negara harus segera membebaskan anak-anak yang bisa pulang dengan aman ke keluarga dan komunitas mereka. Bilamana memungkinkan untuk dilaksanakan dengan aman dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk meningkatnya risiko tertular penyakit dalam tahanan, dan mempertimbangkan keinginan anak, Negara perlu memprioritaskan pembebasan anak-anak yang dicabut kebebasannya agar mereka bisa kembali ke keluarga, kerabat, pengasuhan berbasis keluarga, komunitas, atau fasilitas kesehatan yang sesuai:

- Semua anak dan pengasuh mereka yang dicabut kebebasannya berdasarkan hasil putusan proses hukum pidana terhadap pengasuh anak atas pelanggaran yang tidak melibatkan kekerasan, pelanggaran kecil atau ringan, dan mereka yang dijadwalkan segera bebas atau telah mendekati akhir masa hukuman;^{xiii}
- Semua anak yang dikurung dalam tahanan pra-peradilan terlepas dari jenis pelanggaran mereka, mengingat asas praduga tak bersalah;
- Semua anak yang dicabut kebebasannya karena tindak pidana kenakalan anak (pelanggaran yang tidak dianggap sebagai tindakan kriminal bila dilakukan oleh orang dewasa);
- Semua anak yang berisiko paling tinggi mengalami komplikasi jika terinfeksi, termasuk anak-anak dengan kondisi kesehatan fisik dan mental yang sudah ada sebelumnya;
- Semua anak yang dijatuhi hukuman karena pelanggaran yang tidak melibatkan kekerasan, pelanggaran kecil atau ringan, dan mereka yang dijadwalkan segera bebas atau telah mendekati akhir masa hukuman;
- Semua anak yang berada dalam tahanan imigrasi;^{xiv}
- Semua anak yang ditahan atas alasan keamanan nasional hanya karena berafiliasi dengan kelompok bersenjata;^{xv}
- Setiap anak yang telah ditentukan layak dan aman untuk dibebaskan.

Pertimbangan perlu diberikan terhadap perintah pembebasan massal berdasarkan kriteria di

atas dan dengan melihat urgensi situasi.

Negara perlu memberi dukungan dan membantu para keluarga dan pengasuh untuk mewujudkan reintegrasi yang aman bagi anak-anak,^{xvi} sejalan dengan kepentingan terbaik mereka, kepada keluarga dan masyarakat setelah mereka dibebaskan. Hal ini dilakukan dengan proses manajemen kasus – termasuk: memberi izin perjalanan jika diperlukan, menghubungkan keluarga dan anak-anak dengan layanan kesehatan (misalnya, untuk perawatan COVID-19), kesehatan mental dan psikososial (misalnya, perawatan klinis), layanan untuk pencegahan dan respons kekerasan (termasuk kekerasan berbasis gender), layanan pendidikan, dan peluang-peluang lainnya.

Langkah-langkah yang dapat diambil para **pelaku utama di sektor keadilan untuk mencegah pencabutan hak dan memastikan anak-anak dibebaskan dari tahanan** selama pandemi COVID-19.

Petugas **kepolisian, tahanan**, imigrasi, penjaga perbatasan, dan petugas penegak hukum lainnya dapat:

- Menghapus denda, mengurangi dakwaan, penangkapan, dan penahanan anak, termasuk yang berkaitan dengan upaya penanggulangan seperti pelanggaran jam malam/pembatasan gerak
- Menerapkan teknik-teknik ramah anak dan sensitif gender dalam berinteraksi dengan anak-anak
- Menjauhkan/mengalihkan anak dari sistem peradilan formal sedini mungkin setelah kontak pertama, dan pada setiap tahapan proses peradilan
- Meninjau ulang persyaratan masa percobaan dan pengawasan bagi anak-anak (khususnya kunjungan langsung) untuk memungkinkan jaga jarak fisik bilamana memungkinkan (misalnya, dengan memanfaatkan teknologi untuk kegiatan pertemuan atau pengawasan)
- Dalam upaya penegakan keimigrasian, melakukan *screening* dan segera merujuk semua anak-anak dan keluarga migran, pencari suaka, dan pengungsi ke fasilitas perlindungan, petugas perlindungan, dan pengasuhan anak yang sesuai.

Jaksa, kuasa hukum, dan pengacara bantuan hukum dapat mengadvokasikan:

- Pembebasan segera atau pembebasan dini anak-anak dari semua fasilitas penahanan (sesuai dengan rekomendasi ini)
- Pengalihan anak dari sistem peradilan formal sedini mungkin setelah kontak pertama, dan pada setiap tahapan proses peradilan

- Prioritas penggunaan tindakan non-penahanan, termasuk alternatif-alternatif untuk program penahanan dan pengalihan (yang sesuai)
- Penerbitan grasi secara luas, amnesti, atau perintah pembebasan massal secara umum

Pengadilan dapat:

- Mengurangi sidang/pertemuan tatap muka dengan memberlakukan modalitas alternatif tanpa mengorbankan hak dasar anak atas persidangan yang adil
- Mempertimbangkan konsekuensi kesehatan dari setiap hukuman penahanan
- Membatasi dan mengurangi penerapan hukuman penahanan untuk semua anak (baik pra-persidangan maupun pasca persidangan).
- Mengalihkan anak-anak dari sistem peradilan
- Meningkatkan penerapan tindakan non-penahanan, termasuk alternatif-alternatif untuk program penahanan dan pengalihan (yang sesuai)
- Menerbitkan grasi secara luas, amnesti, atau perintah pembebasan massal secara umum

Pembuat hukum dan kebijakan dapat:

Selama proses pembebasan, Pemerintah seyogianya mengikuti rekomendasi-rekomendasi yang tercantum dalam Pedoman WHO tentang Penahanan selama masa COVID-19 dan Pedoman Sementara IASC untuk pencegahan, penanggulangan, pengelolaan dan penanganan virus.

3.2 Mencegah Masuknya Anak-Anak Baru ke dalam Fasilitas Penahanan

Negara perlu melaksanakan semua langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah masuknya anak-anak baru ke dalam tempat-tempat penahanan. Negara perlu menerapkan moratorium terhadap penangkapan, razia anak-anak jalanan, penahanan semalam, dan tindakan-tindakan lain yang mengakibatkan masuknya anak-anak baru ke dalam fasilitas penahanan. Akan tetapi, apabila diputuskan oleh pihak berwenang yang kompeten, dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak, bahwa mencabut kebebasan anak adalah suatu hal yang legal, perlu, dan proporsional berdasarkan situasi tertentu masing-masing kasus, Negara seyogianya:

- Melakukan *screening* terhadap semua anak (bersama pengasuh apabila mereka ditahan bersama) dan mengambil semua langkah yang sesuai dengan protokol kesehatan publik yang diterbitkan oleh World Health Organization;
- Apabila pembatasan fisik, isolasi atau karantina anak diberlakukan untuk alasan

kesehatan, tindakan ini perlu dilakukan di rumah atau fasilitas kesehatan, dan bukan di dalam fasilitas penahanan.

3.3 Melindungi Kesehatan dan Kesentosaan Anak-Anak dalam Tahanan

Negara perlu melindungi dan menjaga kesehatan dan kesentosaan anak-anak yang menetap di tahanan. Anak-anak yang tidak menerima tindakan pembebasan segera dan yang dicabut kebebasannya selama pandemi perlu disediakan akses ke layanan yang diperlukan untuk memastikan kesehatan dan kesentosaan mereka tetap terjaga, termasuk perawatan kesehatan demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan terkait COVID-19, tanpa diskriminasi. Pihak berwenang perlu:

- Memantau kesehatan anak-anak dan mengenali gejala-gejala penyakit COVID-19, serta memberikan perawatan yang tepat dan mengambil langkah-langkah penanggulangan bagi siapapun yang menunjukkan gejala-gejala sebagaimana disebutkan dalam panduan WHO untuk pemantauan kesehatan, penanggulangan, dan perawatan;
- Mengambil keputusan untuk menempatkan seorang anak dalam isolasi medis hanya jika hal tersebut diperlukan secara medis, sebagai hasil dari keputusan klinis, dan harus berdasarkan persetujuan hukum atau regulasi;
- Memberitahu anak-anak yang ditempatkan dalam isolasi medis alasan mereka diisolasi.^{xvii} Jika pembatasan atau isolasi fisik diperlukan untuk menjaga kesehatan sang anak atau orang lain, karantina di rumah atau di fasilitas kesehatan harus dijalankan sesuai dengan pedoman WHO;
- Jangan pernah menempatkan anak dalam kurungan isolasi dengan alasan apapun, termasuk untuk alasan kesehatan, karena hal tersebut dilarang dalam hukum internasional; isolasi terkait kesehatan tidak boleh digunakan secara *de facto* sebagai kurungan isolasi atau sebagai hukuman;
- Menyediakan anak-anak akses ke kesehatan, nutrisi, pendidikan, dan layanan hukum yang memadai, serta layanan untuk mengatasi kekerasan (termasuk kekerasan berbasis gender) dan layanan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pembatasan fisik atau tindakan pencegahan penyakit lainnya;
- Menyediakan akses yang lebih baik ke air, sanitasi, layanan dan pasokan kebersihan, terutama sabun dan air, dan menyediakan fasilitas dengan persediaan pembersih yang diperlukan untuk membantu mencegah dan mengontrol penyebaran infeksi;
- Menyediakan [Layanan Kesehatan Mental dan Dukungan Psikososial](#) (MHPSS) yang peka gender dan sesuai usia untuk anak-anak dan pengasuh mereka, termasuk mereka yang sebelumnya sudah memiliki masalah kesehatan mental dan psikososial dan mereka yang

mengalami kesulitan dan ketakutan terkait COVID-19;

- Menerapkan prosedur yang memungkinkan anak-anak yang dicabut kebebasannya untuk mempertahankan akses dan kontak rutin dengan wali dan keluarga mereka, termasuk dengan:
 - Menginstruksikan staf fasilitas agar meningkatkan dan menyediakan pembaruan rutin (termasuk melalui telepon atau komputer) bagi keluarga tentang lokasi, kesehatan, dan kesejahteraan anak, dan bagi anak-anak tentang keluarga mereka;
 - Mendukung berbagai cara agar anak-anak, sejalan dengan Pedoman WHO untuk Penahanan Selama Masa COVID-19^{xviii}, dapat menjaga hubungan sosial, termasuk kunjungan langsung oleh anggota keluarga, misalnya dengan memperpanjang waktu kunjungan rutin dan mengatur jadwal kunjungan sedemikian rupa sehingga pembatasan fisik bisa tetap optimal atau dengan memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi interaksi;
 - Menghapuskan biaya atau beban yang dipikul para keluarga terkait kebutuhan ponsel atau digital yang diperlukan untuk memfasilitasi komunikasi antara anak-anak dan keluarga mereka;
 - Mempertimbangkan perlunya menerapkan dispensasi perjalanan khusus untuk orang tua dan keluarga agar mereka dapat melakukan kunjungan.
- Memantau dan menyesuaikan jumlah staf dan penyedia layanan yang tersedia di berbagai fasilitas di mana anak-anak dicabut kebebasannya berada, demi mempertahankan jumlah staf yang memadai untuk memberikan perawatan dan perlindungan yang tepat bagi anak-anak dan untuk mencegah anak-anak memikul tanggung jawab yang berlebihan terkait pemeliharaan fasilitas apabila staf dan penyedia layanan terpapar, terinfeksi, atau terjangkit penyakit tersebut, atau akibat alasan lain tidak dapat menjalankan tugasnya.

Negara harus dipandu Pedoman WHO untuk Penahanan Selama Masa COVID-19 berkenaan dengan langkah-langkah perlindungan dan dukungan bagi staf fasilitas penahanan – misalnya, MHPSS yang mencakup orientasi perawatan diri, dukungan perawatan untuk staf, dan layanan lain terkait kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial mereka. ^{xix}

3.4 Melindungi Anak-anak dari Kekerasan, Pelecehan, dan Eksploitasi

Negara perlu melindungi hak-hak anak dan melindungi mereka dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Pihak berwenang perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak anak yang dicabut kebebasannya dan untuk meminimalkan kerentanan anak terhadap kekerasan,

pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi yang mungkin diperburuk oleh penyakit COVID-19 atau tindakan penahanan, atau yang mungkin merupakan konsekuensi lanjutan. Pihak berwenang perlu:

- Mengembangkan rencana terkoordinasi yang komprehensif untuk memastikan pengelolaan yang baik atas implementasi dan respons lintas pemerintah terhadap pandemi COVID-19 dan anak-anak dalam tahanan, yang mencakup penunjukan layanan peradilan dan layanan sosial untuk anak sebagai hal utama yang memungkinkan kesinambungan layanan semacam itu. Kerjasama dan kolaborasi harus mencakup kementerian-kementerian terkait keadilan, keamanan, urusan dalam negeri, imigrasi, keuangan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pendidikan serta berbagai otoritas terkait lainnya yang berwenang atas tindakan sosial dan kesehatan (termasuk kesehatan mental dan perawatan psikososial), sumber daya, dukungan hukum dan dukungan lainnya, serta atas kontak dengan keluarga dan masyarakat;
- Melibatkan anak-anak dalam proses perencanaan demi mewujudkan hak mereka untuk mengutarakan pandangan dan berpartisipasi dalam keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka;
- Menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengaduan terkait pengamanan anak, termasuk untuk pencegahan kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi;
- Mengizinkan akses rutin berkelanjutan dan kontak antara anak-anak dan perwakilan hukum mereka^{xx}, misalnya dengan memperpanjang waktu kunjungan rutin dan mengatur jadwal kunjungan sedemikian rupa sehingga pembatasan fisik bisa tetap optimal, atau dengan memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi interaksi, sambil tetap menjaga kerahasiaan interaksi-interaksi tersebut; penggunaan sumber daya seluler/ digital untuk memfasilitasi komunikasi tidak dipungut biaya;
- Menjunjung tinggi proses dan jaminan prosedural, termasuk mengizinkan berlangsungnya pengadilan atau pemeriksaan administratif lain terkait anak-anak, masa penahanan pra-persidangan^{xxi}, dan pelepasan terlepas keadaan darurat akibat COVID-19 (misalnya, solusi teknologi dan pengaturan kerja yang fleksibel untuk memungkinkan Pengadilan Darurat tetap berlangsung)^{xxii} ;
- Mengizinkan inspeksi pada semua tempat di mana anak-anak yang dicabut kebebasannya menetap, oleh badan-badan hak asasi manusia internasional dan nasional yang independen^{xxiii}, badan kesehatan, dan otoritas perlindungan anak bahkan di berbagai fasilitas dan lokasi tempat infeksi mungkin ada dan termasuk tempat individu dapat diisolasi karena alasan kesehatan.

4. Sumber Daya

<p><i>Pedoman Interim IASC tentang COVID-19: Fokus pada Orang-Orang yang Dicabut Kebebasannya</i></p>	<p>Panduan operasional untuk orang-orang yang dicabut kebebasannya dan COVID-19</p>
<p><i>Pedoman Interim WHO tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 di penjara dan tempat-tempat penahanan</i></p>	<p>Pedoman WHO tentang Penahanan Selama COVID-19</p>
<p><i>Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR): COVID-19 dan dimensi HAM-nya</i></p>	<p>Panduan OHCHR tentang COVID-19</p>
<p><i>Sub-komite PBB tentang Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Lainnya</i></p>	<p>Anjuran dari Sub-komite tentang Pencegahan Penyiksaan untuk Negara-negara dan Mekanisme Pencegahan Nasional yang berkaitan dengan Pandemi Coronavirus (Versi awal yang belum diedit) (diadopsi pada tanggal 25 Maret 2020)</p>
<p><i>Penjelasan Penal Reform International tentang Virus Corona</i></p>	<p>Instruksi yang berisi Risiko dan praktik dari negara-negara lain</p>
<p><i>ILF tentang Pandemi Virus: Pedoman untuk Penyedia Bantuan Hukum dalam Melindungi Kesehatan dan Hak Asasi Manusia para Tahanan</i></p>	<p>Tindakan yang dapat diambil oleh penyedia bantuan hukum untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan membatasi keparahan dampaknya terhadap orang-orang yang berada dalam tahanan</p>
<p><i>TDH: Percepat pembebasan anak-anak</i></p>	<p>Pernyataan yang berisi panduan tentang pelepasan anak-anak sebagai konsekuensi</p>

<i>dari penahanan</i>	dari COVID-19
<i>Area Tanggung Jawab Perlindungan Anak; Daftar Sumber Daya Perlindungan Anak Selama COVID-19</i>	Sekumpulan sumber daya perlindungan anak terkait respons COVID-19
<i>Aliansi Perlindungan Anak dalam Sumber Daya Aksi Kemanusiaan Selama COVID-19</i>	Sekumpulan sumber daya terkait COVID-19
<i>Pesan dan tindakan utama untuk pencegahan dan pengendalian penyakit virus corona (COVID-19) di sekolah-sekolah</i>	Panduan operasional untuk melindungi anak-anak dan sekolah-sekolah dari COVID-19
<i>INEE: Laman Sumber Daya terkait Virus Corona (COVID-19)</i>	Sekumpulan sumber daya darurat terkait COVID-19 dan pendidikan
<i>Catatan Singkat Referensi Kelompok IASC MHPSS tentang Aspek MHPSS COVID-19</i>	Instruksi tentang aspek MHPSS dari virus corona 2019 (COVID-19)
<i>Mengintegrasikan tindakan mitigasi risiko GBV dan responsnya.</i>	Sekumpulan sumber daya mitigasi risiko GBV dapat diakses di sini .

Catatan Akhir:

i Dalam Catatan ini anak-anak yang “dicabut kebebasannya” termasuk anak-anak yang berada dalam “segala bentuk penahanan atau hukuman penjara atau penempatan ... dalam fasilitas tahanan negeri atau swasta, di mana [mereka] tidak diizinkan untuk pergi sesuka hati, atas perintah dari segala otoritas yudisial, administratif, atau otoritas publik lainnya” sesuai dengan Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlindungan Remaja yang Dicabut Kebebasannya (Peraturan Havana) Pasal 11 (b), Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 37, dan Komentar Umum Komite Hak Anak No. 24 (2019)

tentang hak-hak anak dalam sistem peradilan anak (CRC/C/GC/24) Ayat 8. Lihat juga Studi Global PBB tentang Anak-anak yang Dicabut Kebebasannya, Resolusi Majelis Umum PBB A/74/136 yang merujuk pada Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia tahun 2002 (Pasal 4).

ii “Anak-anak tidak boleh ditahan karena alasan status migrasi mereka atau orang tua mereka dan Negara harus segera dan sepenuhnya menghentikan atau memberantas penahanan imigrasi anak-anak. Setiap jenis penahanan imigrasi atas anak harus dilarang oleh hukum dan larangan tersebut harus dilaksanakan sepenuhnya dalam praktik.” Komentar Umum Bersama No. 4 (2017) dari Komite tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dan No. 23 (2017) dari Komite tentang Hak-hak Anak tentang Kewajiban Negara mengenai HAM anak-anak dalam konteks migrasi internasional di negara asal, transit, tujuan, dan kepulangan, paragraf 5. Lihat juga [Kesepakatan Global untuk Migrasi yang Aman, Teratur, dan Reguler](#) (GCM); [Posisi UNHCR mengenai penahanan anak-anak pengungsi dan migran dalam konteks migrasi](#); [Alternatif UNICEF untuk Penahanan Imigrasi Anak oleh UNICEF](#) (Februari 2019); dan [Pertimbangan Hukum Utama](#) tentang akses ke wilayah bagi orang-orang yang membutuhkan perlindungan internasional dalam respons terhadap COVID-19 oleh UNHCR (16 Maret 2020)

iii Dokumen ini berfokus pada anak-anak yang dicabut kebebasannya dalam sistem peradilan pidana, atas dasar keamanan nasional termasuk dalam sistem peradilan militer, dan dalam penahanan imigrasi. Masalah terkait COVID-19 dan anak-anak di fasilitas pengasuhan di rumah akan dibahas dalam pedoman yang terpisah tetapi saling melengkapi (segera terbit).

iv Pedoman Interim WHO tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 di penjara dan tempat-tempat penahanan (Maret 2020), hlm.1; Lihat juga Komite Tetap Antar Lembaga, [Pedoman Interim COVID-19: Fokus pada Orang-Orang yang Dicabut Kebebasannya](#) (Maret 2020); dan Studi Global PBB tentang Anak-anak yang Dicabut Kebebasannya, Manfred Nowak (2019), Bab 6: Dampak pada kesehatan anak-anak yang dicabut kebebasannya.

v Lihat juga, Pedoman Interim WHO tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 di penjara dan tempat-tempat penahanan (Maret 2020) “Upaya global untuk mengatasi penyebaran penyakit mungkin gagal tanpa perhatian yang tepat terhadap tindakan pengendalian infeksi di dalam penjara.” Lihat juga ICRC, [COVID-19: Melindungi populasi penjara dari penyakit virus corona yang menular](#) (11 Maret 2020).

vi Lihat contoh-contoh CRIN: [Virus Corona dan Anak-Anak yang Ditahan](#) (26 Maret 2020); lihat juga [Instruksi Coronavirus: Kesehatan dan HAM orang-orang di penjara oleh Penal Reform International](#) (16 Maret 2020).

vii Lihat secara umum Pedoman Interim WHO tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 di

penjara dan tempat-tempat penahanan (Maret 2020) dan Komite Tetap Antar Lembaga, Pedoman Interim COVID-19: Fokus pada Orang-Orang yang Dicabut Kebebasannya (Maret 2020); dan umumnya Human Rights Watch, AS: [COVID-19 Mengancam Orang di Balik Jeruji](#) (12 Maret 2020) dan [Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Respons COVID-19](#) (19 Maret 2020), hlm. 8-10.

viii. Paling tidak, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan lainnya, hak untuk bebas dari perbudakan atau kerja paksa, dan hak untuk bebas dari penerapan retroaktif atas hukum pidana, dari pelarangan penahanan sewenang-wenang, dari pengusiran kolektif dan *refoulement*.

ix Lihat secara umum Komite Hak Anak, Komentar Umum No. 24 (2019) tentang hak anak dalam sistem peradilan anak, CRC/C/GC/24 (18 September 2019); Aturan Standar Minimum PBB untuk Administrasi Peradilan Remaja (Peraturan Beijing) GA 40/33 (29 November 1985); Pedoman PBB untuk Pencegahan Kenakalan Remaja (Pedoman Riyadh) GA 45/112 (14 Desember 1990); Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Remaja yang Dicabut Kebebasannya (Peraturan Havana) GA 45/113 (14 Desember 1990); Pedoman untuk Tindakan terhadap Anak-anak dalam Sistem Peradilan Pidana (Pedoman Wina) resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1997/30 (21 Juli 1997); Pedoman Keadilan dalam Hal-Hal yang Melibatkan Korban Anak dan Saksi Kejahatan, resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 2005/20 (22 Juli 2005); Strategi Model PBB dan Langkah-langkah Praktis untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Anak di Bidang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Model Strategi PBB tentang VAC) GA 69/194 (18 Desember 2014).

x Termasuk Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Remaja yang Dicabut Kebebasannya (GA 45/113 tanggal 14 Desember 1990); Aturan Standar Minimum PBB untuk Tindakan Non-penahanan (GA 45/110 tanggal 14 Desember 1990); Prinsip-prinsip Dasar untuk Perlakuan terhadap Narapidana (GA 45/111 tanggal 14 Desember 1990).

xi Hal ini mencakup informasi yang ramah anak dan mudah diakses tentang wabah COVID-19, gejala penyakit, bagaimana anak-anak dapat melindungi diri dari penyakit itu, pilihan perawatan dan informasi terkait kesehatan lainnya.

xii Khususnya [Standar 20: Keadilan untuk anak-anak](#), dan [Standar 11: Anak-anak yang memiliki kaitan dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata](#).

xiii Anak-anak yang hidup dengan pengasuh utama yang ditahan atau dipenjara – biasanya ibu, tetapi kadang-kadang juga ayah atau pengasuh utama lainnya. Lihat secara umum [Studi Global PBB tentang Anak-anak yang Dicabut Kebebasannya](#), Manfred Nowak (2019), Bab 10: Anak-anak yang tinggal di penjara dengan pengasuh utama mereka.

xiv Hal ini mencakup anak-anak (yang tidak didampingi, dipisahkan dari, atau memiliki keluarga) dan keluarga dalam penahanan imigrasi pra-pemindahan di mana deportasi telah ditangguhkan karena

situasi COVID-19. Lihat misalnya Dewan Eropa, [Pernyataan Komisaris yang menyerukan pembebasan tahanan imigrasi selama krisis COVID-19 berlanjut](#) (26 Maret 2020).

xv Anak-anak yang ditahan atas dugaan atau bukti bahwa mereka memiliki kaitan dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, termasuk yang dinyatakan sebagai kelompok teroris, adalah korban dari satu dari enam pelanggaran berat hak-hak anak dalam situasi konflik bersenjata dan harus diperlakukan demikian. (Protokol Tambahan Konvensi Jenewa, Pasal 77 (2) AP I; Pasal 4 (3) AP II; lihat juga Resolusi Dewan Keamanan PBB, 2427 (2018)).

xvi Hal ini termasuk anak-anak dalam tahanan imigrasi, di mana prioritas pertama untuk mereka adalah pembebasan segera dari fasilitas penahanan.

xvii Lihat misalnya NASP dan NSAN, [Berbicara kepada Anak-Anak Tentang COVID-19 \(Virus Corona\): Sumber Daya Orang Tua](#)

xviii [Pedoman Interim WHO tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 di penjara dan tempat-tempat penahanan](#) (Maret 2020), hlm.8, 15, dan 21-22; Lihat juga Komite Tetap Antar Lembaga, [Pedoman Interim Pandemi COVID-19: Fokus pada Orang-Orang yang Dicabut Kebebasannya](#) (Maret 2020).

xix Pedoman Interim WHO tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 di penjara dan tempat-tempat penahanan (Maret 2020); dan Referensi Kelompok Komite Tetap Antar-Badan untuk Kesehatan Mental dan Dukungan Psikososial dalam Pengaturan Darurat, [Catatan instruksi tentang penanganan aspek kesehatan mental dan psikososial selama wabah COVID-19 Versi 1.1](#) (Februari 2020).

xx Anak-anak yang mencari suaka atau pengungsi, termasuk dalam kasus-kasus penahanan, memiliki hak untuk berhubungan dengan UNHCR, lihat Pedoman Penahanan UNHCR 2012 dan Kesimpulan UNHCR ExCom, No. 85 (XLIX), 1998.

xxi Dalam kasus anak-anak, penahanan pra-peradilan tidak boleh digunakan kecuali sebagai upaya terakhir dalam kasus-kasus paling serius setelah pembebasan, penempatan dalam komunitas, dan pengalihan telah dipertimbangkan secara serius, lihat Komite Hak-hak Anak, Komentar Umum No. 24 (2019) tentang hak-hak anak dalam sistem peradilan anak (2019) CRC/C/GC/24, paragraf 86.

xxii Lihat, misalnya, Yayasan Hukum Internasional, [Pandemi Virus Corona: Pedoman bagi Penyedia Bantuan Hukum untuk Melindungi Kesehatan dan Hak Asasi Manusia Para Tahanan](#) (Maret 2020).

xxiii Pedoman Interim WHO tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 di penjara dan tempat-tempat penahanan (Maret 2020), hlm. 5; Komite Tetap Antar Lembaga, Pedoman Interim COVID-19: Fokus pada Orang-Orang yang Dicabut Kebebasannya (Maret 2020); dan Sub-komite PBB tentang Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi, atau

Merendahkan Martabat Lainnya, Sub-komite tentang Pencegahan Penyiksaan untuk Pihak-Pihak Negara dan Mekanisme Pencegahan Nasional yang berkaitan dengan Pandemi Virus Corona (versi awal yang belum diedit) (diadopsi pada tanggal 25 Maret 2020)).

Didukung oleh: